

Transformasi FTZ ke KEK Perlu Kepastian

BATAM – Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam memberikan lima rekomendasi kepada Pemko Batam dan Badan Penguasaan (BP) Batam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

Batam. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin berharap bisa ikut serta memberikan kontribusi pemikiran untuk membangun Batam yang lebih baik.

Ke hal 4))

TRANSFORMASI FTZ ...

«Dari hal 1
Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah tersebut merupakan hasil dari rapat pimpinan organisasinya. Rekomendasi tersebut, di antaranya adalah Kadin meminta kepastian hukum terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal itu sangat perlu dijelaskan pemerintah supaya tidak menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha.

"Sehingga dengan adanya kepastian hukum, investor akan semakin nyaman berinvestasi di Batam," kata Jadi, usai menggelar Rapat Pimpinan Kadin Kota Batam di Best Western Premier Panbil, Kamis (12/4).

Pihaknya juga meminta Pemko Batam dan BP Batam untuk sinergi dalam perkembangan pariwisata, salah satu sektor unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi dengan cepat. Dengan kerjasama yang baik antara kedua lembaga pemerintah tersebut, diyakini potensi pariwisata bisa digarap dengan baik.

Kemudian mengenai perdagangan, kendati berstatus sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sampai saat ini

banyak persoalan yang dialami pengusaha mengenai pengiriman barang dari dan ke Kota Batam. Salah satu hal yang kerap dikeluhkan masyarakat kata Jadi adalah mengenai beberapa harga bahan dasar kebutuhan yang lebih mahal dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

"Padahal Batam memiliki fasilitas FTZ, yang seharusnya bisa mendatangkan beberapa komoditi dari negara lain dengan harga lebih rendah," imbuh dia.

Rekomendasi lainnya adalah mengenai ketenagakerjaan yang setiap tahunnya selalu menghadapi persoalan yang sama. Ia mencontohkan persoalan yang selama ini terjadi adalah terkait dengan penetapan upah buruh yang sering menimbulkan kegaduhan. Pihaknya berharap persoalan ini bisa dicarikan jalan keluar terbaik agar tidak berkelanjutan.

Kadin sebagai organisasi induk pengusaha juga mengajak seluruh organisasi pengusaha untuk membantu memberikan pemikiran kepada pemerintah. Pihaknya mengaku juga akan terus berupaya menjalin hubungan dan koordinasi dengan serikat buruh, sehingga masalah upah ini tidak selalu menjadi polemik setiap tahunnya.

"Salah satu cara yang dapat

dilakukan dengan melakukan pertemuan secara intens antara para pengusaha dengan perwakilan pekerja. Sehingga permasalahan Upah Minimum Kota (UMK) bisa diselesaikan sebelum pemutusan besaran upah pekerja," kata Jadi.

Selain itu, Kadin juga menyoroti pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Batam. Pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan tempat yang layak bagi para pedagang kaki lima yang digusur. Kadin mendukung Pemko Batam menata kembali Batam, hanya saja juga perlu memikirkan pedagang kecil yang terkena imbas dari pembangunan tersebut.

"Jangan sampai pedagang kaki lima ini dibiarkan setelah digusur, harus ada penempatan setelah penggusuran," jelas dia.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat saat ini harus menjadi pemacu untuk terus bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam tujuh persen dalam dua tahun. Pemerintah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Batam.

Ditegaskannya bahwa Pemko

Batam juga berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) saat ini diharapkan juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus segala perizinan. MPP di Batam saat ini menjadi banyak percontohan bagi daerah lainnya, hampir setiap hari, menurut Amsakar banyak pemerintah daerah melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung pelayanan di MPP.

"Saya juga selalu pesan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk segera laporkan kepada kami jika ada pelayanan Pemko Batam yang berbelit ataupun ada kendala di sana," kata Amsakar.

Amsakar juga menyatakan mendukung langkah BP Batam untuk mempercepat penerbitan IPH, pasalnya diakuinya hal itu berpengaruh terhadap perolehan BPHTB. Dimana merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi, sehingga jika IPH lancar tentu target pendapatan daerah juga bisa tercapai.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya komitmen secara bertahap menyelesaikan sejumlah persoalan di Batam. Ia menga-

kui dua sektor industri yang menjadi penompang pertumbuhan ekonomi Batam yakni sektor migas dan manufaktur mengalami perlambatan, sehingga diakuinya perlu sektor baru untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Batam.

"Karena itu kita ikut serta mengembangkan sektor pariwisata, karena jangka pendek target kita aalah dua tahun tujuh persen," kata Lukita.

Ia juga menegaskan akan mendukung penuh apa yang dicanangkan Pemko Batam dan DPRD Batam untuk menjadikan Batam menjadi lebih baik. Seperti halnya permasalahan pedagang kaki lima, BP Batam mendukung penuh rencana Pemko Batam menerbitkan Perda pedagang kaki lima di Batam.

Bahkan ditegaskannya BP Batam siap mengalokasikan di setiap kecamatan nantinya ada tempat khusus untuk pemberdayaan pelaku UMKM. Dengan sinergitas yang dibangun bersama dan potensi yang ada saat ini, pihaknya yakin Batam akan kembali bergairah di segala sektor industrinya.

"Kita diharapkan bisa lebih dari 7 persen, karena potensi itu kita miliki," kata dia.

● ahmad rohmadi

Pemko Datangkan Gus Muwafiq

SAGULUNG – Pemko Batam mengundang ustaz kondang Gus Muwafiq untuk mengisi ceramah pada acara Isra Miraj tingkat Kota Batam, Jumat (13/4). Peringatan Isra Miraj dipusatkan di lapangan SP Plaza, Sagulung mulai pukul 19.30. Gus Muwafiq merupakan ustaz dari Jogjakarta dengan nama lengkap Ahmad Muwafiq. Pria yang disapa dengan Cak Afiq ini pernah menjadi asisten pribadi Presi-

den RI Gus Dur.

Adapun yang menjadi tema pada peringatan Isra Miraj tahun ini "Dengan Peringatan Isra Miraj Kita Jadikan Salat Sebagai Kebutuhan dan Bekal Kehidupan Dunia dan Akhirat".

Kepala Bagian Kesra Sekdako Batam, Riama Manurung mengundang seluruh masyarakat Kota Batam untuk dapat hadir dalam peringatan Isra Miraj. Dia memperkirakan ada sekitar 10 ribu masyarakat akan hadir.

Pemko Datangkan ...

(((Dari hal 9

"Kami juga akan mengundang anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam, tokoh agama, imam masjid dan guru TPQ Kota Batam," ujarnya, kemarin.

Riama mengimbau agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Batam untuk dapat hadir bersama-sama dalam acara Isra Miraj. Bagian Kesra Batam akan menyura-

ti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) agar seluruh ASN hadir meramaikan kegiatan keagamaan ini.

Panitia juga akan menampilkan grup marawis Thoriqul Jannah. Peringatan Isra Miraj diawali pembacaan ayat suci Al quran, dan kemudian dilanjutkan tausiyah dari Gus Muwafiq.

 **iwan sahputra**

4 Ribu Berkas IPH Menumpuk

BATAM – Sebanyak 4 ribu berkas Izin Peralihan Hak (IPH) saat ini belum terselesaikan pengurusannya. Kalangan pengembang pun mengeluhkan prosesnya yang lambat. Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiasatinya dengan menambah 30 pegawai.

Sebagian besar berkas-berkas tersebut mandek sejak tahun lalu. "Karena bagian SDM (sumber daya manusia) untuk pelayanan di kantor lahan masih kurang. Karena itu akan

kita tambah sekitar 30 SDM yang bertugas untuk melayani penerbitan IPH. Untuk menyelesaikan tumpukan berkas saat ini," kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Kamis (12/4).

Dijelaskannya, bahwa 30 SDM tersebut bukan penambahan pegawai baru, melainkan akan diambil dari unit lainnya yang akan ditugaskan sementara di pelayanan Kantor Pengelolaan Lahan. Ke hal 4))

DUA TAHUN TAK SELESAI

Ada sekitar 4 ribu berkas Izin Peralihan Hak (IPH) yang belum terselesaikan pengurusannya. Berkas-berkas tersebut mandek sejak tahun lalu, bahkan ada yang sejak 2016.

TAMBAH 30 PEGAWAI

BP Batam menambah 30 pegawai yang diambil dari direktorat lain untuk membantu Kantor Pelayanan Lahan BP Batam yang kesulitan menyelesaikan IPH tepat waktu karena berkas yang menumpuk.

PANGKAS SYARAT IPH

17 SYARAT LAMA

Menyertakan fotokopi KTP, fotokopi bayar lunas Uang Wajib Tahunan (UWT) 30 tahun, fotokopi Surat Perjanjian (SPJ), fotokopi Surat Keputusan (Skep), fotokopi Akta Jual Beli, fotokopi persetujuan peralihan hak, fotokopi bukti pembayaran faktur peralihan hak, fotokopi PL (gambar PL asli diserahkan untuk diendorse), dan sertifikasi Hak Atas Tanah dan beberapa syarat lainnya.

3 SYARAT BARU

KTP atau paspor bagi yang pribadi dan akta perusahaan bagi yang badan. Kemudian sertifikat, jika dokumen ini tidak ada bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti fotokopi PL fotokopi SPJ, atau fotokopi Skep. Selanjutnya yakni mengisi formulir permohonan IPH dan surat permohonan pecah PL, bagi yang belum dipecah.

4 Ribu ...

☞ Dari hal 1

Jika pengurusan IPH sudah berjalan normal, para pegawai tersebut nantinya akan kembali di unit masing-masing.

Selain pelayanan IPH di Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagian pelayanan juga akan dibuka di Kantor BP Batam. Menurut Lukita, langkah itu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. "Kemarin sudah saya putuskan, 30 pegawai akan kita perbantukan untuk pelayanan di Kantor Lahan. Karena kalau tidak ditambah, tidak akan selesai masalah IPH ini," kata dia.

Menurut dia tidak hanya 4 ribu berkas IPH saja yang belum terselesaikan, saat ini juga ada sekitar 2 ribu berkas Surat Perjanjian (SPj) dan Surat Keputusan (Skep) yang juga belum selesai. Dengan adanya penambahan SDM di Kantor Pengelolaan Lahan nantinya akan dapat menyelesaikan berkas yang mandek.

Lukita menyatakan sudah membuat terobosan baru dengan memangkas persyaratan untuk pemohon IPH. Dari 17 syarat yang selama ini menjadi syarat wajib telah dipangkas menjadi tiga syarat. Tujuannya agar dapat memudahkan masyarakat ataupun pelaku usaha yang mengajukan permohonan IPH. "Kami akan terus berkomitmen melakukan perbaikan untuk mempercepat proses penerbitan IPH," jelas Lukita.

Permasalahan IPH menjadi bagian sangat penting yang harus diselesaikan, sebab jika IPH terhambat, akan berpengaruh pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga hal ini akan berdampak terhadap pemasukan pendapatan daerah yang dikelola Pemko Batam.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya pemohon harus mengisi formulir permohonan, menyertakan fotokopi KTP, fotokopi bayar lunas Uang Wajib Tahunan (UWT) 30 tahun, fotokopi Surat Perjanjian (SPJ), fotokopi Surat Keputusan (Skep), fotokopi Akta Jual Beli, fotokopi persetujuan peralihan hak, fotokopi bukti pembayaran faktur peralihan hak, fotokopi PL (gambar PL asli diserahkan untuk diendorse), dan sertifikasi Hak Atas Tanah dan beberapa syarat lainnya.

Namun dengan adanya penyederhanaan ini pemohon hanya wajib menyiapkan kartu identitas seperti KTP atau paspor bagi yang pribadi dan akta perusahaan bagi yang badan. Kemudian sertifikat, jika dokumen ini tidak ada bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti fotokopi PL fotokopi SPJ, atau fotokopi Skep. Selanjutnya yakni mengisi formulir permohonan IPH dan surat permohonan pecah PL, bagi yang belum dipecah.

"Intinya kita ingin mempercepat proses. IPH bisa diurus lebih dulu syarat dokumen bisa menyusul, sehingga pelayanan bisa lebih maksimal," tegas Lukita.

Sebelumnya, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam Achyar Arfan mengatakan pelayanan IPH di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kendati sudah berjalan proses penerbitan IPH, namun saat ini belum maksimal dan masih ada beberapa kendala di lapangan.

"Masih belum ada perubahan, satu berkas bisa sampai dua bulan. Kalau diproses memang iya, tapi masih lama," kata Achyar, Senin (19/3).

● ahmad rohmadi